

## PERLU *GRAND STRATEGY* GERAKAN SOSIAL NU

**Zuhdi Muhdlor**

Pejabat Sementara Ketua Umum PP. GP. Ansor

**G**erakan Pemuda Ansor periode ini memiliki beberapa program unggulan yang disebut sapta khidmah (tujuh perhidmatan), yang isinya antara lain adalah pengembangan kesadaran akan hak warga negara dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ini sangat penting, karena setelah reformasi banyak tantangan yang mengarah pada disintegrasi bangsa, gerakan separatisme, dan melunturnya jati diri bangsa. Bagaikan lepas dari kerangkeng mereka lari tanpa kendali, moralitas tidak diindahkkan lagi, nilai agama sudah tidak mampu mengendalikan masyarakat dengan baik. Orang sering menyebutkan bahwa bangsa ini sedang sakit. Maka, bagi Ansor, memperteguh komitmen keindonesiaan, keislaman, dan ke-NU-an menjadi sangat penting. Keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab Ansor bersama masyarakat. Menumbuhkan kembali patriotisme dan kesadaran berdemokrasi masih relevan dikedepankan Ansor. Dan itu dilakukan Ansor di daerah-daerah.

Di masa transisi seperti saat ini, di mana pola hubungan antara masyarakat

dan negara berubah, lembaga-lembaga negara berubah, dan sistem politik berubah, maka Ansor melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap perubahan-perubahan. Untuk itu, Ansor menyelenggarakan diskusi mingguan, malam jum'at, dan diskusi bulanan. Kajian ini diikuti oleh lembaga-lembaga dan departemen-departemen yang ada di Ansor.

Salah satu hasil konkret dari pengkajian ini adalah rumusan-rumusan untuk memberikan *guidance* agar masyarakat—terutama warga NU—tidak terpengaruh dengan euforia yang bisa menjauhkan mereka dari jati dirinya. Antara lain, secara internal, Ansor melakukan penataan ulang terhadap konsep pengkaderan. Hasilnya, Ansor kini memiliki pola pengkaderan terbaru—yang merupakan hasil refleksi, perenungan, dan pengkajian terhadap berbagai dinamika yang terjadi—yang disesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Konsep baru pengkaderan ini telah disosialisasikan dan diujicobakan di berbagai wilayah melalui berbagai forum baik formal—PKD, PKL, dan seterusnya—maupun non formal.

Sementara itu, untuk penguatan kelembagaan (*institutional building*), Ansor melakukan kerja-kerja konsolidasi. Kalau kita lihat data-data kuantitatif, seluruh wilayah dan cabang telah terbentuk. Kecuali daerah-daerah pemekaran. Untuk wilayah pemekaran ada yang telah dibentuk, ada yang sudah ditunjuk *caretaker* dan ada yang belum. Belum lama ini, di NTT dilakukan konsolidasi ke cabang-cabang. Ada tujuh belas cabang telah terbentuk, dan dalam waktu dekat akan melakukan konferensi wilayah.

Sebagai garda depan organisasi sosial-keagamaan, Ansor dituntut mengembangkan pengabdian sosialnya. Memang ada tantangan besar yang dihadapi Ansor yaitu godaan-godaan politik. Apakah ini merupakan "garis tangan" atau takdir bagi Ansor atau sesuatu yang bisa diubah? Tapi yang jelas, latar belakang berdirinya Ansor memang hampir seluruhnya politik, sehingga visi sosial Ansor sangat lemah. Padahal, jika dibandingkan dengan komunitas Ansor seluruhnya, jumlah anggota Ansor yang ada di politik sebenarnya kecil. Hanya saja mereka berada di tingkat elite, sehingga bisa mewarnai. Karena itu, program-program sosial kalah dengan yang politis. Tapi bukan berarti gerakan sosial mandeg sama sekali. Ansor telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial namun tidak tercover dengan baik karena kalah dengan sayap politik. PP GP Ansor telah mencoba membagi kader, siapa yang aktif di politik, dan siapa yang *jogo* umat. Menjaga umat itu dalam arti, menjaga visi dan misi organisatoris Ansor yang non-

politik, dan mengawal visi sosial-ekonomi dan keagamaannya.

Untuk masa yang akan datang, gerakan untuk lebih menguatkan aspek pelayanan sosial harus ditekankan. Sambil mendorong kader yang aktif di politik, Ansor perlu serius di proyek-proyek rintisan, di pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Dalam hal ini, kita butuh contoh konkret dari NU. Dulu NU pernah menjadi pelopor pengembangan *civil society*. Tapi lama-kelamaan bangunan yang lama dirintis dan diharapkan banyak pihak itu akhirnya hancur ketika pemimpin NU ramai-ramai terjun ke dunia politik. Gus Dur sendiri—yang sebelumnya apolitis, abirokrasi, dan menjadi pelopor gerakan pemberdayaan rakyat—begitu ada peluang politik lari lebih dahulu. Akhirnya, bangunan yang dirintis lama sekali, dan dipuji banyak pihak di luar NU, berantakan semua. Bangunan itu ingin kita rintis kembali.

Untuk itu, NU perlu mempunyai *grand strategy* mengenai bangunan *civil society* yang diharapkan. Dalam diskusi yang mengundang tokoh-tokoh NU terlihat bahwa *grand strategy* NU untuk menciptakan model masyarakat yang dikehendaki, masih sangat umum. Rumusannya hanya terbatas pada asas *tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, dan sebagainya. Wujud konkretnya seperti apa, itu tidak terjawab. Maka perlu ada *grand strategy* yang jelas, agar seluruh badan otonom, lajnah, dan lembaga di bawah NU mengarahkan kerja mereka ke sana. Ini mesti jadi agenda untuk Mukhtamar di Solo. ■